

INFO LPSPL SERANG

Laporan, Surat Menyurat, Dokumen

2025



Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademik;

No	Dokumen	Link
1	Undang-Undang 1. Undang-undang 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati 2. Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan 3. Undang-undang tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Undang-undang 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU 31 tahun 2004 tentang Perikan	https://portal-repo.kkp.go.id/s/KirmNEBE8PY39ZA?path=%2F1.%20Undang-Undang
2	Peraturan Pemerintah 1. Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2007 tentang Sumberdaya Ikan 2. Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	https://portal-repo.kkp.go.id/s/KirmNEBE8PY39ZA?path=%2F2.%20Peraturan%20Pemerintah
3	Peraturan Menteri KP 1. Keputusan Dirjen no 43 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi (Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Rekomendasi Hiu Pari) 2. Keputusan Dirjen no 04 tahun 2014 tentang Penyusunan Reklamasi secara Induk, Studi Kelayakan, Rencana Detail Reklamasi 3. Peraturan Menteri KP no 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis	https://portal-repo.kkp.go.id/s/KirmNEBE8PY39ZA?path=%2F3.%20Peraturan%20Menteri

	4. PerMen KP No. 12 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (By Catch Penyu, mamalia Laut, Hiu Monyet) 5. PerMen KP No. 19 tahun 2012 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Sidat (<i>Anguilla spp</i>) Dari Wilayah Republik Indonesia 6. PerMen KP No. 26 tahun 2013 tentang Perubahan Atas PerMen KP No. 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP RI (By Catch Penyu, mamalia Laut, Hiu Monyet, non ikan) 7. PerMen KP No. 18 tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) 8. PerMen KP No. 37 tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (<i>Chellinius undulatus</i>) 9. PerMen KP No. 4 tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Parimanta 10. KepMen KP No. 46 tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Bambu Laut (<i>Isis spp</i>) 11. PerMen KP No. 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, Rajungan dari Wilayah RI 12. PerMen KP No. 5 tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo dan Hiu Martil dari Wilayah Republik Indonesia ke Luar Negeri 13. PerMen KP No. 61 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks 14. KepMen KP No. 16 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) Tahun 2021-2025 15. KepMen KP No. 79 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut 16. KepMen KP No. 65 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu Tahun 2022-2024 17. SE MKP No. 526 MEN-KP VIII 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur Bagian Tubuh dan atau Produk Turunannya	
--	--	--

	18. KepMen KP No. 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk (<i>Tenualosa Macrura</i> dan <i>Tenualosa Ilisha</i>) Tahun 2022-2024 19. KepMen KP No. 73 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Sidat (<i>Anguilla Spp.</i>) Tahun 2022-2024 20. KepMen KP No. 74 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Capungan Banggai (<i>Pterapogon Kauderni</i>) Tahun 2022-2024 21. SE MKP No. 526 MEN-KP VIII 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur Bagian Tubuh dan atau Produk Turunannya	
--	---	--